

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)  
TAHUN ANGGARAN 2022  
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

*Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR RI:  
**SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.**  
Anggota Nomor: A-25*

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera untuk kita semua,***

Yang Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang  
Yang Terhormat, Saudara Anggota Dewan  
Yang Terhormat, Saudari Menteri Keuangan RI  
Yang Terhormat, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Bappenas  
Serta Hadirin sekalian yang berbahagia

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir, baik secara fisik maupun virtual, dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baladun toyyibatun wa rabbun ghafur*.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

BKF

Penyusunan dan perumusan kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2022 melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya bersifat *business as usual*, namun harus bersifat *out of the box* dan memberikan terobosan-terobosan riil untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan terus berkelanjutan meski masih dibawah bayang-bayang akan ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 serta berbagai dampak distortif-nya. FPKB memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2022 yang bertemakan ***“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”*** harus menjadi pijakan bersama seluruh stakeholder dalam melakukan transformasi struktural yang lebih menyeluruh, untuk mempercepat

program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan dengan dilakukan secara efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang banyak terpuruk akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu. Dalam hal ini FPKB sependapat dengan Presiden Joko Widodo seperti yang beliau sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu bahwa pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Berkaitan telah disampaikannya RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu, dimana dalam dokumen tersebut juga menyertakan rencana target Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Indikator-Indikator Kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi di tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, FPKB telah mencatat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,0 persen - 5,5 persen.** FPKB berpendapat bahwa rentang target pertumbuhan ekonomi tersebut cukup realistis pada batas bawah dan cenderung *over estimate* pada batas atas. Namun demikian, secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan tergantung pada seberapa besar dorongan pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang semakin lebih baik selaras dengan proses pemulihan dari eskalasi pandemi Covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya. FPKB mendesak pemerintah agar mampu memaksimalkan berbagai sumber-sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional, seperti peningkatan konsumsi masyarakat dengan optimalisasi kebijakan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat. Optimalisasi belanja barang dan modal, reformasi struktural serta peningkatan layanan berbasis digital oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri, peningkatan kinerja export dan import dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi faktor penting guna menurunkan angka pengangguran. FPKB juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan peranan sektor pertanian yang merupakan sumber lapangan kerja rakyat Indonesia dan penopang ketahanan pangan. Pengembangan konsep kelompok usaha (*group of enterprises*) dan *food estate* serta penggunaan teknologi diharapkan menjadi solusi sehingga petani dapat merasakan hasil yang lebih tinggi dan mendorong efisiensi produksi.
2. **Terkait dengan target inflasi sebesar 3,0 persen,** FPKB berpendapat bahwa dengan terus meningkatnya jumlah masyarakat yang sudah divaksin guna menurunkan tingkat penularan Covid-19, maka mobilitas masyarakat dan aktifitas ekonomi akan juga berangsur membaik, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk menjaga ekspektasi inflasi di tahun 2022 tetap terkendali maka

Bappenas  
BKF  
DJA (SD1)

peningkatan koordinasi kebijakan antara otoritas moneter, otoritas fiskal dan sektor riil melalui sinergitas koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia harus terjaga dengan baik. Secara umum pergerakan inflasi pada tahun 2022 diperkirakan masih akan berasal dari komponen inti dan komponen bergejolak maupun karena faktor musiman dan iklim. FPKB juga mendorong kepada pemerintah untuk tetap menjaga dan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dan energy lainnya yang dibutuhkan masyarakat guna percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pasokan pangan ditengah terus menurunnya pasokan pangan global akibat dari faktor alam yang ekstrem dengan melakukan perbaikan sistem logistik nasional dan penguatan infrastruktur.

3. **Nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar 14.350 Rupiah per dollar AS tahun 2022**, FPKB berpandangan target tersebut cukup rasional ditengah tekanan keuangan global yang membayangi. Pulihnya perekonomian AS akan membuat banyak investor memilih untuk menginvestasikan ke instrumen yang dikeluarkan oleh AS yang dianggap lebih aman dan menguntungkan, hal itu akan membuat fluktuasi nilai tukar rupiah terganggu. FPKB juga mendorong kepada pemerintah untuk terus melakukan optimalisasi implementasi UU Ciptaker berserta turunnya dengan melakukan berbagai penyederhanaan perizinan guna mendorong investasi didalam negeri. Untuk menghindari potensi pelemahan rupiah dari asumsi, maka FPKB mendukung upaya pemerintah bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS untuk bersinergi dalam memitigasi resiko ini melalui langkah-langkah perbaikan struktural di sektor keuangan sehingga dapat berdampak positif menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu peningkatan penggunaan mata uang lokal (*local currency*) dalam perdagangan antar Negara dalam kawasan seperti Negara di ASEAN juga akan mengurangi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
4. **Terhadap penetapan target tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun sebesar 6,82 Persen**, FPKB berpendapat bahwa penetapan suku bunga tersebut masih cukup moderat. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun yang rendah memang sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan efisiensi belanja negara, khususnya belanja bunga utang. Dengan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan fiskal yang optimal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dengan hal itu maka tingkat suku bunga SBN 10 tahun juga dapat ditekan. Penggunaan instrumen SBN sebagai salah satu sumber pembiayaan dan pengelolaan hutang luar negeri yang semakin hari semakin membesar juga harus diperhatikan dengan lebih cermat dan hati-hati. FPKB meminta kepada pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan otoritas moneter dalam rangka menjaga rasio hutang Negara yang semakin mengkhawatirkan.
5. Penetapan **harga minyak mentah Indonesia (ICP)** oleh pemerintah **sebesar US\$ 63 per barel** di tahun 2022. FPKB memandang bahwa resiko ketidakstabilan harga akibat fluktuasi pergerakan harga minyak mentah dunia pada tahun 2022 masih akan terjadi. ICP diperkirakan akan naik dibandingkan tahun 2021 dengan asumsi permintaan minyak dunia naik seiring dengan semakin terkendalnya covid-19 dan juga

keberlanjutan kebijakan pengurangan produksi minyak dari OPEC+. Namun faktor geopolitik di Timur Tengah yang tidak menentu juga akan membatasi kenaikan harga minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah tentu dapat menambah penerimaan Negara dari sisi PNBP migas, namun upaya tersebut tentu tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan mengingat target lifting dalam negeri seringkali tidak tercapai.

6. **Asumsi Lifting minyak bumi dipatok sebesar 703 ribu barel per hari (bph) dan juga lifting gas bumi sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).** FPKB mendorong agar target lifting minyak dan gas di 2022 minimal harus mencapai batas atas proyeksi lifting yang diajukan pada KEM-PPKF 2022, yaitu masing-masing sebesar 726 ribu barel per hari untuk lifting minyak bumi dan 1.103 ribu barel setara minyak per hari untuk lifting gas. Target tersebut harus benar-benar dipayakan agar dapat membantu penerimaan negara dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya harga minyak dunia, sehingga dapat memenuhi tingkat keekonomian proyek teknologi *Enhanced Oil Recovery* dan reaktivasi sumur tua. Selain itu pemerintah juga harus mempercepat pelaksanaan produksi proyek migas yang sudah direncanakan seperti proyek Pasir Petroleum, Pacific Oil & Gas, SGE, Eni East Sepingga, PEPC (Lapangan Jambaran Tiung Biru/JTB), dan Tangguh Train-3.
7. Lebih lanjut, FPKB menyoroti target indikator kesejahteraan dalam rangka memastikan berjalannya tatanan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

**Pertama, Tingkat pengangguran terbuka ditarget pada kisaran 5,5 – 6,3 persen.** Untuk mencapai target tersebut, FPKB meminta agar pemerintah lebih selektif dalam membuat program pembangunan infrastruktur dan mengarahkannya kepada program infrastruktur padat karya. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, FPKB juga mendorong efektivitas program pelatihan keterampilan untuk penganggur muda agar mendapatkan kerja yang layak ataupun menjadi wirausahawan.

**Kedua, Angka kemiskinan ditarget pada kisaran 8,5 – 9,0 persen dan Tingkat Ketimpangan atau Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378.** FPKB meminta kepada pemerintah agar terus memperbaiki target sasaran dari program perlindungan sosial. Data sasaran perlindungan sosial harus bisa diidentifikasi setepat-tepatnya agar yang dapat bantuan benar masuk kategori miskin dengan alamat jelas yang bisa ditelusuri sehingga bantuan tidak salah alamat. Selain itu, FPKB mendorong pemerintah untuk meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan, karena di sektor tersebut merupakan sumber utama dari rumah tangga miskin.

**Ketiga, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46.** Dalam rangka meningkatkan IPM ini, FPKB meminta kepada pemerintah untuk menormalisasi system Pendidikan, baik melalui pembelajaran langsung maupun pembelajaran jarak jauh. Hal ini berkaitan dengan kualitas Pendidikan yang menurun dalam implementasi pembelajaran jarak jauh dan mengancam terjadinya *lost generation*.

Disisi Kesehatan, FPKB menggarisbawahi bahwa dalam masa pandemi ini, penyakit kronis non covid-19 sulit untuk mendapatkan layanan dan fasilitas Kesehatan. Maka dari itu, FPKB meminta agar pemerintah juga memperhatikan kesiapan fasilitas Kesehatan untuk melayani pasien non-covid-19.

Terkait dengan target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing berada pada kisaran 103 – 105 dan 104 – 106. FPKB mendukung peningkatan NTP dan NTN yang ditetapkan oleh pemerintah, mengingat banyak keluarga miskin yang berasal dari petani dan nelayan. Di sisi pendapatan petani dan nelayan, FPKB mendorong agar pemerintah memfasilitasi peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui bantuan subsidi dan penyediaan infrastruktur. Di sisi pengendalian pengeluaran konsumsi rumah tangga petani dan nelayan pemberian raskin, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan lainnya rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Setelah mencermati postur RAPBN tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah, maka FPKB memandang perlu memberikan beberapa catatan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Target **Pendapatan Negara** dalam RAPBN TA 2022 sebesar Rp1.840,7 triliun atau tumbuh 9,0 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. **Penerimaan Perpajakan** diperkirakan mencapai sebesar Rp1.506,9 triliun atau naik sebesar 9,5 persen dari *outlook* tahun 2021, dan untuk **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** ditargetkan tumbuh negatif sebesar 0,7 persen dari *outlook* tahun 2021 mencapai sebesar Rp333,2 triliun, serta **Penerimaan Hibah** ditargetkan sebesar Rp 0,6 triliun. FPKB memandang bahwa target pendapatan negara ini cenderung *over estimate* dengan mempertimbangkan masih banyaknya resiko yang akan dihadapi dalam pemungutan penerimaan pajak maupun PNBP di tahun 2022 nanti sebagai konsekuensi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional dan global akibat pandemi Covid-19, serta rencana pemerintah untuk meneruskan pemberian berbagai insentif perpajakan. Untuk megoptimalkan penerimaan negara demi terwujudnya konsolidasi fiskal jangka menengah, pemerintah juga telah mengajukan perbaikan regulasi sebagai perwujudan reformasi perpajakan yang sudah dimulai pada tahun 2021 ini yaitu melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Bersama DPR RI.

Tanpa bermaksud menggurui, FPKB mengingatkan pemerintah dalam upaya mendorong sistem perpajakan menjadi lebih efektif sebagai instrumen kebijakan, meminimalkan distorsi, adaptif dengan perubahan struktur ekonomi, teknologi, aktivitas dunia usaha dan perpajakan global, menjamin kepastian hukum serta optimal sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan tetap harus dengan

BKF  
DJP  
DJA  
- PNBP KL  
- PNBP SDA  
- (SD 1)

didukung oleh otoritas pajak yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. FPKB berpendapat langkah Pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui RUU KUP seperti yang dimaksud didalam Nota Keuangan yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, fleksibel dan akuntabel akan sulit dilakukan tanpa disertai dengan reformasi kelembagaan sebagai salah satu kebijakan fiskal yang diwujudkan melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan yang bersifat otonom.

Selain itu, FPKB memandang ketegasan otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan disertai langkah *extra effort* untuk memperluas basis data perpajakan setidaknya akan mendorong pencapaian penerimaan pajak menjadi lebih baik di tahun 2022 nanti, sehingga bisa memutus *shortfall* pajak seperti dalam duabelas tahun terakhir ini. Demikian juga terkait wacana *sunset policy* yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka idealnya kebijakan tersebut harus dapat meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang selama ini relatif rendah dibanding negara G20 dan ASEAN-6 maupun diarahkan untuk mendorong meningkatnya rasio pertumbuhan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (*tax buoyancy*) sebagai indikator untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi yang sampai sekarang masih dibawah angka 1 (satu).

FPKB memahami tidak tercapainya target dan terjadinya kontraksi penerimaan perpajakan tersebut tentu sangat berdampak dalam pengelolaan kebijakan fiskal melalui instrumen APBN. Akan tetapi, FPKB juga memandang upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan dengan menambah obyek pemungutan PPN seperti yang diusulkan dalam Revisi UU KUP yaitu terkait dengan barang dan jasa yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat seperti pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dan juga jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis untuk dipertimbangkan secara mendalam. Penambahan objek PPN tersebut yang dilakukan di tengah momentum pemulihan ekonomi baik di masa pandemi maupun paska pandemi tetap berisiko dapat menurunkan laju daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, yang selama ini merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu mengingat potensi mudharat nya yang besar, maka FPKB dengan berpegang pada prinsip '**qowaidul fiqh**' yang berbunyi "**dar'ul mafasid muqaddamun 'ala al-jalbi al-masholih**" (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan), maka secara tegas menolak pengenaan objek PPN untuk barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak.

Secara umum FPKB berpendapat naiknya target Penerimaan Pajak ditahun 2022 baik yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya dengan total Rp1.262,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dari *Outlook* tahun 2021 dari sisi eksternal sangat bergantung kepada membaiknya harga komoditas utama dunia maupun dari dalam negeri berasal dari

seberapa cepat keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional. Besaran target Penerimaan Pajak tahun 2022 seperti PPh migas yang didorong akan meningkat 3,4 persen dan juga penerimaan PPh nonmigas tumbuh 11,3 persen maupun penerimaan PPN dan PPnBM akan meningkat sebesar 10,1 persen, lalu penerimaan PBB ditargetkan meningkat 23,8 persen serta pendapatan Pajak Lainnya ditargetkan meningkat 7,0 persen dari outlook tahun 2021 jelas membutuhkan dukungan perbaikan administrasi perpajakan dan reformasi kelembagaan yang serius oleh pemerintah.

Demikian juga terkait target penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan meningkat 4,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021 harus memperhatikan dampak lebih lanjut pemberian insentif fiskal kepabeanan maupun efektifitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah seperti pemberlakuan pengenaan cukai produk plastik. Selain itu, dengan adanya proyeksi mulai membaiknya perekonomian global dan nasional di tahun 2022 maka aktifitas ekspor dan impor diharapkan meningkat kembali, maka dengan dukungan penerapan *National Logistics Ecosystem* (NLE) dan juga penguatan *joint program* antara DJP-DJBC-DJA, FPKB mendesak pemerintah dapat meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai lebih baik lagi. Secara khusus FPKB berpendapat bahwa tingginya kontribusi cukai hasil tembakau selama ini harus berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan serapan tenaga kerja industri tembakau sesuai dengan empat pilar yang dicanangkan yaitu pengendalian, penerimaan, tenaga kerja, dan dampak ke rokok ilegal.

Di sisi lain, FPKB berpendapat turunnya target **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** dalam RAPBN tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp333,2 triliun atau terkontraksi sebesar 6,7 persen dari *outlook* tahun 2021 sangat disayangkan. Turunnya target PNBP ini akibat kemungkinan terjadinya penurunan PNBP SDA Migas yang terkontraksi sebesar 9,5 persen dan juga adanya potensi penurunan pada PNBP Lainnya yang bisa terkontraksi sebesar 17,9 persen dari *outlook* tahun 2021. Dilain sisi, menurut perhitungan pemerintah dalam RAPBN 2022 bahwa penerimaan PNBP SDA Non Migas diperkirakan masih mampu tumbuh 0,2 persen, PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) akan tumbuh 18,6 persen, serta pendapatan dari BLU bisa lebih tinggi 0,6 persen dari outlook tahun 2021. Pendapatan SDA nonmigas selain yang berasal dari pertambangan mineral dan batubara yang diprediksi minus 3,3 persen, maka sumber pendapatan dari kehutanan, perikanan, dan panas bumi diperkirakan bisa tumbuh positif yaitu 5,3 persen, 70,1 persen dan 7,5 persen dari outlook tahun 2021.

FPKB cukup mengapresiasi peningkatan target PNBP Perikanan di tahun 2022 yang cukup tinggi, hal ini masih memungkinkan dengan melihat potensi Produksi Perikanan Tangkap yang masih sangat besar di Indonesia apalagi jika didukung dengan penegakan hukum terkait pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Sedangkan terkait PNBP KND yaitu pendapatan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN berupa dividen, maka FPKB berharap bisa meningkat di tahun 2022, apalagi dalam beberapa tahun terakhir pemerintah juga

DJBC  
DJP  
DJA  
- (SD1)  
- HPP

DJKN  
DJA  
- (SD1)  
- PNBP SDA

sudah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak sedikit kepada BUMN. Selanjutnya kembali pada persoalan potensi penurunan dari PNBP SDA Migas dan PNBP Lainnya pada tahun 2022 nanti, maka tidak ada acara lain harus dimitigasi agar tidak berkontraksi semakin dalam. Pemerintah wajib memastikan upaya pengendalian *cost recovery* KKKS yang terkait PNBP SDA bisa maksimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya *operational expenditure (opex)* dan *capital expenditure (capex)* termasuk *unrecovered cost*, serta melakukan penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan untuk PNBP Lainnya.

2. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, kebijakan **Belanja Negara** dalam RAPBN Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yaitu terdiri dari **Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp. 1.938,3 triliun dan belanja **Transfer ke Daerah dan Dana Desa** sebesar Rp. 770,4 triliun. Terhadap porsi belanja tersebut, FPKB memahami bahwa dalam rangka konsolidasi fiskal menghadapi normalisasi anggaran pada tahun 2023, pemerintah mengurangi pagu belanja negara. Namun FPKB menyayangkan ketimpangan pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat yang sebesar 0,6 persen dengan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang hanya tumbuh 0,02 persen. FPKB mendorong penyeimbangan pertumbuhan antar komponen belanja tersebut karena kebutuhan pendanaan daerah akan meningkat seiring dengan kebutuhan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan juga penanganan covid-19 yang dilakukan oleh daerah seperti insentif untuk Tenaga Kesehatan dan proses vaksinasi.

FPKB memandang alokasi **Belanja Pemerintah Pusat** yang terdiri dari **Belanja K/L** sebesar Rp.940,6 triliun maupun **Belanja Non K/L** sebesar Rp.997,7 triliun, dimana besaran Belanja Non K/L lebih besar dari belanja K/L harus dikelola dengan efektif, efisien, dan produktif, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 secara cepat dan tepat sasaran. Secara umum, FPKB melihat bahwa arah kebijakan belanja K/L oleh pemerintah di tahun 2022 yang diprioritaskan pada bidang pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, TIK, ketahanan pangan, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan tersebut cukup komprehensif untuk mendukung proses pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan akibat pandemi Covid-19 tersebut.

Secara khusus terkait **belanja bidang Pendidikan** yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 541,7 Triliun atau 20 persen dari belanja, FPKB mendorong pemanfaatan anggaran Pendidikan untuk **Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Angkatan Kerja melalui Pelatihan Vokasi**. Hal tersebut didasarkan pada data bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia, sebanyak 56% dari jumlah tenaga kerja masih berpendidikan SMP kebawah, dan 24 persen pengangguran terbuka adalah lulusan SMK. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas masih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa. Untuk dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja serta memperluas penyebaran angkatan kerja yang berkualitas, maka dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja dengan pelatihan vokasi dan

BKF  
DJPK  
DJA  
- (SD1, SD2,  
SD3, SD4)  
- Abid  
Ekontim,  
PMK,  
Polhukhankam  
BA-BUN

DJA  
- (SD 3)  
- Abid PMK

sertifikasi kompetensi di seluruh Indonesia yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga tercipta *link and match* antara kompetensi Angkatan kerja dan kebutuhan dunia usaha dan dunia Industri. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan proporsi kebhkerjaan dan produktivitas angkatan kerja di Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, FPKB mendorong pemerintah untuk terus melakukan efisiensi pada **belanja pegawai** yang pada tahun 2022 meningkat sebesar 6,9 persen menjadi Rp 426.8 triliun atau 22 persen dari Belanja Pemerintah Pusat. FPKB memandang bahwa kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas serta efisiensi birokrasi juga harus diikuti dengan efisiensi anggaran belanja pegawai. Maka dari itu, peningkatan belanja pegawai harus dirasionalisasi sejalan dengan reformasi birokrasi dan cara kerja baru yang lebih efisien. Kemudian terkait **belanja barang** sebesar Rp 337,8 triliun atau setara 17,43 persen, FPKB meminta pemerintah agar belanja barang yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitasnya agar produktivitas masyarakat dapat meningkat.

Selanjutnya mengenai **belanja modal** sebesar Rp 196,6 triliun atau sebesar 10,14 persen, FPKB menggarisbawahi bahwa alokasi belanja modal pemerintah semakin menyusut. Hal tersebut dapat akan merugikan masyarakat karena belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik. Selain itu, FPKB meminta agar pemerintah memperbanyak porsi proyek padat karya, FPKB meminta kepada pemerintah agar pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, terutama di bidang Pendidikan. Di sisi yang lain Program Pengelolaan Utang Negara untuk **pembayaran bunga utang** dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp. 405,8 triliun atau 20,94 dari total Belanja Pemerintah Pusat. Belanja pembayaran utang merupakan alokasi belanja terbesar kedua setelah belanja pegawai. Peningkatan yang sangat tajam ini merupakan konsekuensi logis dari fiskal ekspansif yang diterapkan oleh Indonesia dan dampaknya adalah ruang fiskal yang semakin menyempit. Oleh karena itu, FPKB mendorong pemerintah untuk melakukan renegoisasi dengan para kreditur agar terdapat ruang fiskal untuk pemulihan ekonomi.

Sedangkan alokasi **belanja bantuan sosial** di tahun 2022 adalah sebesar Rp 146,5 Triliun atau sebesar 7,56 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. FPKB meminta agar pemerintah terus memperbaiki dan meningkatkan keakuratan data penerima agar lebih tepat sasaran, tepat waktu dan jumlah guna. Selain itu, FPKB juga meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan sosial untuk pekerja informal yang jumlahnya sebanyak 56,5 persen dari jumlah pekerja di Indonesia. Terkait alokasi anggaran subsidi tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 206,9 triliun atau sebesar 10,68 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat, yang dibagi untuk **subsidi energi** sebesar Rp. 134 triliun dan **subsidi non energi** sebesar Rp. 72,9 triliun. FPKB mendukung reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk LPG tabung 3 kg. FPKB juga mendorong agar subsidi solar juga diubah menjadi subsidi berbasis orang. Hal tersebut akan semakin

BKF  
DJA  
- Abid Ekontim  
- Abid PMK  
- Abid  
Polhukhankam  
BABUN  
- (SD2, SD3,  
SD4, SD5)

meningkatkan ketepatan sasaran dari program subsidi. Sedangkan untuk subsidi listrik, FPKB mendorong pemerintah untuk menngkaji kembali bahwa subsidi listrik berdasarkan DTKS, mengingat data DTKS belum solid dan juga banyak rumah tangga miskin, khususnya yang merupakan pelanggan R1 450 VA yang belum masuk kedalam DTKS.

DJA  
- (SD2)

Terkait dengan belanja **Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** 2022, pemerintah didalam Nota Keuangan belum menyebutkan secara spesifik detail kegiatan akan dilanjutkan seperti apa, namun anggarannya sudah dicadangkan pada **Program Pengelolaan Belanja Lainnya** sebesar Rp 230 Triliun. FPKB pada prinsipnya mendukung apabila program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022 tetap dijalankan dengan catatan bahwa anggaran tidak diperuntukkan hanya untuk sektor esensial yang mendukung percepatan penanggulangan Covid-19 dan menjaga serta meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, FPKB mendorong agar Program PEN ini dijalankan secara efektif sehingga mulai bidang kesehatan hingga insentif usaha bisa berjalan beriringan, serta perlindungan sosial dapat diarahkan kepada program yang lebih produktif.

DJPK  
DJA  
- (SD4)

Mengenai alokasi anggaran **Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa** yang direncanakan sebesar Rp 770,4 triliun harus bisa menjadi *trigger* dalam melakukan pemulihan ekonomi di daerah akibat dari pandemi covid 19. Dana **Transfer ke Daerah** sebesar Rp.673,7 triliun dalam RAPBN 2022 yang dibagi *pertama*, Dana Perimbangan yaitu **Dana Transfer Umum** (Dana Bagi Hasil/ DBH dan Dana Alokasi Umum/ DAU) dan **Dana Transfer Khusus** (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Dana Perimbangan meningkat sebesar 1,4 persen dari Rp 664,4 Triliun pada outlook 2021 menjadi Rp 673,7 Triliun pada 2021. Terkait dengan **DAU**, FPKB mendorong agar pemerintah melakukan reformulasi DAU dengan menitikberatkan pada jumlah penduduk di daerah agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal dan lebih mencerminkan keadilan. Selain itu, terkait dengan DAU yang akan disalurkan berbasis kinerja, FPKB mendukung langkah tersebut agar anggaran di daerah dapat menghasilkan pelayanan pemerintah daerah yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diperhatikan kesiapan daerah agar terhadap daerah yang masih memiliki kinerja rendah tetap bisa mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

*Kedua*, **Dana Insentif Daerah (DID)** menurun sebesar 47 persen dari outlook 2021 menjadi Rp 7 Triliun di tahun 2022. Di tahun pemulihan ekonomi ini, FPKB mendorong agar pemerintah memberikan prioritas DID kepada pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan pelayanan publik seperti pendidikan, utamanya dalam menunjang Pembelajaran Jarak Jauh dan kesehatan, serta yang sudah memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi terhadap warganya . Serta *ketiga*, **Dana Otonomi Khusus** dan **Dana Keistimewaan DIY** yang masing-masing dialokasikan sebesar Rp 20,4 Triliun dan Rp1,3 Triliun pada tahun 2022. Terkait Dana Otonomi Khusus, FPKB mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan sudah mendesak dilakukan.

Sedangkan anggaran **Dana Desa** ditargetkan sebesar Rp.68,0 triliun dalam RAPBN 2022, mengalami penurunan sebesar Rp3,8 Triliun atau 5,4 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2021. FPKB sangat menyayangkan dengan penurunan alokasi dana desa ini, mengingat anggaran desa sangat bermanfaat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana kita ketahui, dimasa pandemi dana desa dipergunakan untuk BLT Dana Desa dan untuk program Padat Karya Tunai Desa yang mampu menjadi penyangga peningkatan angka pengangguran di masa pandemi. Oleh karena itu, FPKB meminta agar Dana Desa dapat ditingkatkan kembali untuk menggerakkan perekonomian di desa. Selain itu, FPKB juga mendorong agar prioritas dana desa digunakan untuk memperbaiki kelembagaan dan manajemen BUMDes agar dapat menjadi *buffer* perekonomian desa

3. FPKB memandang pelaksanaan kebijakan *fiskal ekspansif konsolidatif* dengan besaran **Defisit dan Pembiayaan Anggaran** pada tahun 2022 sebesar 4,85 persen dari PDB atau setara Rp868,02 triliun akan menjadi pertaruhan terhadap kredibilitas Pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Terlebih sesuai mandat yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 bahwa batas akhir diizinkan defisit APBN diatas 3 persen hanya sampai pelaksanaan APBN tahun 2022 nanti. Mengingat APBN juga merupakan instrumen *countercyclical* dalam menjaga stabilitas makroekonomi, maka pemerintah harus segera memiliki solusi yang lebih riil melaksanakan konsolidasi fiskal terutama menjaga laju defisit APBN dan defisit kesimbangan primer di tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.462,2 triliun bisa semakin melandai di tahun berikutnya. Pembiayaan anggaran yang terdiri dari **Pembiayaan Utang** sebesar Rp973,6 triliun, **Pembiayaan Investasi** sebesar minus Rp182,3 triliun, **Pemberian Pinjaman** sebesar Rp0,6 triliun dan **Kewajiban Penjaminan** sebesar minus Rp1,1 triliun serta **Pembiayaan Lainnya** sebesar Rp77,3 triliun harus dikelola secara cermat, terukur dan hati-hati.

FPKB berpendapat rencana sumber pembiayaan anggaran tahun 2022 dari **Pembiayaan Utang maupun Non Utang** harus dioptimalkan untuk mendukung program-program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan. FPKB meminta pemerintah terus konsisten dalam menjaga disiplin fiskal agar tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka menengah panjang. Khususnya didalam menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, terutama terhadap pengelolaan SBN karena sangat rentan dengan pergolakan pasar dan risiko *crowding out*. FPKB terus mendukung upaya pemerintah mendorong pembiayaan non utang selain sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, diarahkan dapat meningkatkan *value creation* agar dampak dan *spillover effects* yang dihasilkan dari alokasi pembiayaan non-utang bisa lebih besar dari *cost of funds* untuk pembiayaan penerbitan SBN.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. FPKB sangat menyadari bahwa tantangan Pemerintah dalam mengelola keuangan negara semakin berat terutama dalam masa pandemi ini, oleh karena itu FPKB meminta komitmen pemerintah bahwa sekiranya tidak sanggup memenuhi seluruh target pembangunan tersebut maka tetap harus ikhtiyar semampunya mengerjakan yang bisa dilakukan sebagaimana kaidah fiqih:

جُلُّهُ يُتْرَكُ لَا كُلُّهُ يُدْرِكُ لَا مَا

(Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya)

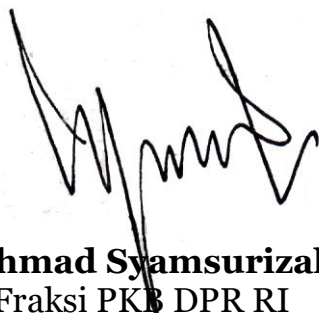
Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas segala perhatian yang diberikan, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridloannya. Aamiin.

**Wallahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriq,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Jakarta, 19 Agustus 2021

**PIMPINAN,  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**



**H. Cucun Ahmad Syamsurizal M.A.P.**  
Ketua Fraksi PKB DPR RI



**Drs. Fathan**  
Sekretaris Fraksi PKB DPR RI